**SEJARAH KELURAHAN TAKIMPO KECAMATAN PASARWAJO
KABUPATEN BUTON (1981-2017)¹**

Oleh

Maria²

Email: psj_maria@gmail.com

La Batia³

Email: labatia@uho.ac.id

ABSTRAK: Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1) Apa yang melatarbelakangi terbentuknya Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton? 2) Bagaimana proses terbentuknya Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton? 3) Bagaimana perkembangan Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton (1981-2017)? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah menurut Helium Sjamsuddin dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: Heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (Kritik Sumber), Historiografi (penulisan sejarah). Dalam kajian pustaka penelitian ini menggunakan konsep sejarah, konsep pemerintahan daerah, konsep kelurahan, konsep perkembangan, dan syarat terbentuknya kelurahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Latar belakang terbentuknya Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dilihat dari beberapa faktor yaitu: a) Faktor jumlah penduduk, b) Faktor luas wilayah, c) Faktor sosial budaya, d) Faktor potensi kelurahan, e) Sarana dan prasarana. 2) Proses terbentuknya Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton adalah a) Diawali dengan musyawarah Organisasi LKMD sekarang disebut LPM beserta kepala lingkungan Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, b) Dari hasil musyawarah memutuskan bahwa harus ada yang mengusulkan terkait adanya pemekaran Kelurahan Takimpo, dalam proses pengusulan tersebut waktu yang dibutuhkan untuk memperjuangkan terbentuknya Kelurahan Takimpo 1 tahun 2 bulan, c) Sesudah pengusulan dilaksanakan dan disetujui kemudian diadakan kembali musyawarah, untuk membahas pembagian batas-batas wilayah Kelurahan Kombeli dan Kelurahan Takimpo. 3) Perkembangan Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dari tahun 1981-2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan: a) Dalam bidang ekonomi masyarakat Kelurahan Takimpo mengalami kemajuan demikian pula dengan profesi-profesi lain makin hari makin nampak, misalnya, petani, pedagang dan pekerjaan lain yang dapat memberikan hasil yang lebih baik untuk menghidupi keluarganya. b) Dalam bidang politik Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton diawali dengan penunjukkan lurah pertama yaitu La Kabona, hingga kepala kelurahan saat ini yaitu La Dila, c) Dalam bidang sarana dan prasarana antara lain Benteng Lipu Ogena, SDN 1 Takimpo, SDN 2 Takimpo, Masjid, dan pasar.

Kata Kunci: *Latar Belakang, Proses dan Perkembangan*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara besar yang terkenal dengan sebutan negara agraris. Setiap tahun mengalami perkembangan jumlah penduduk yang umumnya bermukim atau berdomilisi disuatu wilayah seperti desa/kelurahan, dengan peningkatan jumlah penduduk tersebut, maka menurut pemerintah selalu memperluas wilayah pemukiman penduduk. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat bermukiman di pedesaan/kelurahan.

¹ Disandur dari hasil penelitian Tahun 2018

² Alumni Jurusan Pendidikan Sejarah

³ Dosen FKIP UHO

Tampaknya telah ada semacam konsensus nasional di Indonesia bahwa partisipasi rakyat dalam proses pembangunan nasional, termasuk pembangunan wilayah, merupakan persyaratan utama yang melandasi keberhasilan proses pembangunan Indonesia. Memang, bagi tahap perkembangan Indonesia partisipasi rakyat merupakan tuntutan nasional guna memecahkan suatu permasalahan baru yang kita hadapi dalam membangun negara, yakni masalah pengembangan dan hasil pembangunan yang telah dicapai selama ini.

Kelurahan Takimpo merupakan pemekaran dari Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton yang disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk sehingga karena melihat jumlah penduduk di Kelurahan Kombeli semakin padat dan memenuhi syarat untuk dibentuk lagi satu kelurahan dalam arti sudah memenuhi persyaratan seperti luas wilayah, sosial budaya, potensi kelurahan, dan sarana dan prasarana yang merupakan syarat-syarat terbentuknya daerah baru sebagai mana yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 tentang syarat pembentukan kelurahan/setingkat desa. Atas dasar pembentukan/pemekaran daerah baru maka jumlah kelurahan yang awalnya hanya delapan yakni Kelurahan Awainalu, Kelurahan Kahulugaya, Kelurahan kambula-mbula, Kelurahan kombeli, Kelurahan Pasarwajo, Kelurahan Saragi, Kelurahan wasaga dengan terbentuknya Kelurahan Takimpo menjadi Sembilan kelurahan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.

Proses pembentukan Kelurahan Takimpo di Kecamatan Pasarwajo, tidak terlepas dari pengembangan wilayah, administrasi pemerintah, ekonomi, sosial, budaya yang teratur, sebagai mana halnya pembentukan kelurahan-kelurahan lainnya yang ada di Sulawesi Tenggara pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya pembentukan suatu kelurahan dilakukan setelah mengenal persyaratan yang telah ditetapkan Republik Indonesia sebagai mana yang tercantum dalam pedoman umum pengaturan yang mengenai pembentukan kelurahan.

Salah satu faktor yang mempercepat pembentukan Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo adalah fenomena perkembangan penduduk di wilayah tersebut yang terus meningkat dengan memperhatikan potensi wilayah, sarana dan prasarana serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu, faktor lain yang mempercepat pembentukan kelurahan ini karena didukung keadaan geografisnya yang sangat strategis dan mudah dijangkau oleh kalangan masyarakat yang ingin berdomisili dan layanan transportasinya juga yang sangat lancar sehingga mudahnya berhubungan dengan wilayah lain yang berada di wilayah Sulawesi Tenggara. Selain itu, potensi penduduk sangat penting dalam mengelola secara komperhensif potensi yang ada, sehingga potensi Sumber Daya Alam (SDM) yang ada di wilayah tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga terbentuklah Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton pada tahun 1981.

METODOLOGI PENELITIAN

Sesuai dengan judul penelitian ini maka yang menjadi tempat atau lokasi Penelitian adalah di Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu pada bulan September-Desember 2018.

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni suatu jenis penelitian dimana peneliti berusaha mendeskripsikan data-data dan fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan bahan informasi/temuan dari objek yang diteliti dilapangan atau lokasi penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan strukturalis yaitu mempelajari peristiwa dan struktur sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi, artinya peristiwa mengandung kekuatan mengubah struktur sosial, sedangkan struktur mengandung hambatan atau dorongan bagi tindakan perubahan dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini menggunakan tiga kategori sumber data penelitian yaitu sebagai berikut: 1) Sumber tertulis, yakni data yang diperoleh dari berbagai literatur dalam bentuk, buku, skripsi, serta sumber tertulis lainnya dalam bentuk arsip yang sesuai dengan kajian penelitian ini. Sumber tersebut diperoleh dari perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Perpustakaan Universitas Halu Oleo dan Perpustakaan FKIP UHO, serta Kantor Kelurahan Takimpo. 2) Sumber

lisan, yakni data yang diperoleh melalui keterangan lisan (wawancara) dengan lima orang informan diantaranya tokoh adat/masyarakat, tokoh agama, dan aparat pemerintah setempat yang banyak mengetahui masalah yang diteliti. 3) Sumber visual (benda-benda), yakni data yang diperoleh melalui hasil pengamatan secara langsung dan pendokumentasian dalam bentuk foto terhadap berbagai macam bentuk kegiatan-kegiatan warga serta sarana dan prasarana di Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.

Prosedur dalam penelitian ini menggunakan metode sejarah menurut Sjamsuddin (2007: 85-239) yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu: (1) Heuristik (pengumpulan sumber), (2) verifikasi (Kritik Sumber), dan (3) Historiografi (penulisan sejarah). Prosedur ini pada dasarnya sama saja dengan prosedur penelitian sejarah lainnya dengan asumsi data-data yang diperoleh dalam penelitian ini benar-benar dapat dipertanggung jawabkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Terbentuknya Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton

Sebelum kelurahan Takimpo berdiri sebagai satu kelurahan wilayah Kelurahan Takimpo masih gabungan dari Kelurahan Kombeli. Setelah bertahun-tahun Takimpo berada dalam naungan Kelurahan Kombeli pada masa pemerintahan La Kabona dan pada akhirnya penduduk Kelurahan Takimpo semakin bertambah. Maka dari itu dengan melihat perkembangan penduduk yang semakin pesat, pemerintah Kecamatan Pasarwajo menyusulkan Kelurahan Takimpo berdiri sendiri menjadi satu kelurahan. Kemudian pada tahun 1981 Kelurahan Takimpo resmi menjadi satu kelurahan.

Awal mula nama Kelurahan Takimpo diambil dari kondisi masyarakat pada saat itu dimana menurut informan La Ramlia mengatakan bahwa konon ceritanya dulu ada 9 (sembilan) kampung kecil yang hidup pada masa Kesultanan Buton tinggalnya menyebar pada dimensi searah mata angin diatas perbukitan yang tinggi lalu munculnya *parabela* pertama yang bernama La Djibara yang berusaha menyatukan 9 (sembilan) kampung kecil tersebut dengan mengadakan pertemuan akbar, dari hasil pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk bersatu dan membentuk parlemen adat, dari ketua adat hingga perangkat adat. Lalu menerapkan peraturan adat yang lebih beradab, santun dan bijak. Dari situ maka lahirlah sebuah nama Takimpo yang berarti perkumpulan (La Ramlia, Wawancara 25 September 2018).

Pemekaran Kelurahan Takimpo berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang pembentukan kelurahan/setingkat desa, dengan melihat dengan beberapa syarat yaitu: faktor jumlah penduduk dimana jumlah penduduk Kelurahan Takimpo dengan tingkat kepadatan 1.711 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 131 jiwa dan perempuan 113 jiwa (Sumber: Kantor Kelurahan Takimpo Tahun 2017). Disamping itu faktor luas wilayah, dimakan adanya dukungan wilayah dalam rangka pelaksanaan pemerintah, baik tingkat negara, provinsi, kecamatan, maupun di tingkat desa/kelurahan merupakan suatu hal yang sangat penting. Demikian pula halnya dengan latar belakang terbentuknya Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Pertimbangan luas wilayah sangat mendukung terjadinya pemekaran disuatu wilayah dengan wilayah yang cukup luas yaitu Kelurahan Takimpo memiliki luas wilayah sekitar 3,52 km² dan juga didukung oleh kondisi tanah yang cocok untuk dijadikan areal pertanian dan perkebunan tertama perkebunan jambu mente, jagung, ubi dan lain-lain (Sumber: Kantor Kelurahan Takimpo Tahun 2017).

Faktor lainnya adalah sosial budaya merupakan faktor pendukung pembentukan suatu kelurahan melalui kegiatan pembangunan dalam bidang sosial budaya diharapkan antar masyarakat yang ada di Kelurahan Takimpo baik yang beragam suku yang ada di dalamnya maupun pemerintah yang terjalin hubungan yang harmonis, hormat menghormati, guna dalam menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kelurahan Takimpo. Kegiatan pembangunan dalam bidang sosial Kelurahan Takimpo sudah terwujud sebelum Kelurahan Takimpo definitif, pembangunan yang dimaksud seperti melalui saluran-saluran organisasi sosial. Organisasi sosial yang dimaksudkan

sebagai wadah untuk menghimpun para warga masyarakat seluruh potensi yang dimiliki oleh daerah setempat, sehingga dikenal dengan sistem budaya *pohamba-hambai* (saling membantu) yang masih tetap terwujud kelestariannya hingga sekarang ini, yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama, baik antara pemerintah maupun sesama anggota masyarakat setempat yang saling mendukung dalam perjuangan pembentukan Kelurahan Takimpo. Sistem budaya *pohamba-hambai* (saling membantu) ini sering dilakukan jika ada kegiatan-kegiatan apa saja dalam lingkup desa maupun sesama masyarakat itu sendiri, sehingga terwujud hubungan timbal balik yang harmonis dalam lingkup Kelurahan Takimpo. Kemudian Kelurahan Takimpo memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Budaya juga merupakan faktor pendukung terbentuknya Kelurahan dimana masyarakat setempat memiliki kekerabatan yang sangat menonjol dan tidak akan hilang sampai sekarang. Sistem kekerabatan ini masih dipegang teguh oleh masyarakat dan nilai-nilai budaya sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Kelurahan Takimpo (La Ramlia, Wawancara 25 September 2018). Disamping faktor tersebut di atas masih ada lagi yang mendukung terbentuknya Kelurahan Takimpo yakni Potensi Kelurahan Takimpo yang merupakan salah satu kelurahan yang mayoritas penduduknya petani, tetapi kadang untuk melakukan kerja sampingan masyarakat Kelurahan Takimpo ada pula yang menjadi nelayan. Di samping itu Kelurahan Takimpo masih memiliki wilayah yang bisa dijadikan untuk lokasi pertanian, dilihat dari segi geografis Kelurahan Takimpo berpotensi untuk kawasan petani dan nelayan.

Kelurahan Takimpo sangat berpotensi untuk daerah perkebunan serta perikanan, misalnya jambu mete, ubi, jagung, faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya pemekaran suatu wilayah. Keadaan ekonomi masyarakat Kelurahan Takimpo merupakan dasar dalam pembangunan baik itu potensi ekonomi pertanian, perkebunan, kelautan maupun pasukan retribusi yang diperoleh dari sarana prasarana kelurahan yakni pasar Kelurahan Takimpo. Dengan adanya berbagai jenis usaha jasa dan produksi serta keanegaraman mata pencaharian di Kelurahan Takimpo menjadikan pembangunan di daerah ini semakin maju dimana tingkat kesejahteraan dan kemakmuran suatu masyarakat banyak dipengaruhi tinggi rendahnya kehidupan ekonomi masyarakat.

Faktor pendukung lainnya adalah sarana dan prasarana adalah merupakan faktor pendukung pembentukan suatu daerah. Begitupun dengan pemekaran Kelurahan Takimpo tidak terlepas dari dukungan faktor sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan pelayanan yang memadai yang sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas sebagai aparat pemerintah. Yang dimaksud sarana dan prasarana pendukung disini adalah benda-benda dan alat-alat serta bangunan yang mendukung dalam pelaksanaan tugas pelayanan. Sarana dan prasarana pemerintah apabila tidak dimiliki suatu kelurahan maka membuat suatu daerah akan lamban dalam pengurusannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh La Dila bahwa "Kelurahan Takimpo sebelum mengalami pemekaran masih berada di bawah pemerintahan Kelurahan Kombeli sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kelurahan Takimpo telah boleh dikatakan sudah memadai baik dari sarana pendidikan, yakni sekolah SD dan yang terdiri dari SD Negeri 1 Takimpo dan SD Negeri 2 Takimpo, dan, tempat peribadan yakni 1 buah masjid dan terdapat pasar. Pernyataan tersebut nampak bahwa Kelurahan Takimpo ketika belum dimekarkan sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai pendukung pelaksanaan pemerintah (La Dila, Wawancara 30 September 2018).

Proses Terbentuknya Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo

Pemekaran Kelurahan Takimpo dari Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton merupakan kebijakan atau upaya pemerintah dalam rangka membentuk kelurahan efektivitas dengan tujuan tercapainya efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga, Kelurahan sebagai sentral pelayanan publik yang dapat memberikan pelayanan prima kepada warga yang mengurus segala keperluan yang terkait dalam administrasi kependidikan

Adapun jenis pelayanan yang diberikan pemerintah Kelurahan Takimpo adalah sebagai berikut: (1) Surat Pengantar Kartu Tanda Penduduk sementara, (2) Surat Pengantar keteangan berdomisili, (3) Surat keterangan memiliki usaha, (3) Surat keterangan ahli waris, (4) Surat

keterangan berkelakuan baik, (4) Surat keterangan tidak mampu, (5) Surat NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk), (6) Surat pengantar meminjam uang dibank

Melihat bidang tugas yang begitu kompleks, maka sebagai aparat kelurahan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Karena hajad hidup orang banyak memang memerlukan pengakuan administrasi pemerintah agar hidup dan kehidupan dalam masyarakat menjadi lebih tenang karena segala urusan mempunyai kekuatan hukum (La Hari, Wawanara 5 November 2018).

Dalam melakukan suatu pemekaran tidaklah semudah apa yang kita bayangkan dimana suatu wilayah ketika ingin melakukan pemekaran harus melewati beberapa proses, bukan hanya dari daerah itu sendiri dalam hal ini sudah memenuhi kriteria diadakannya pemekaran secara yuridis namun harus ada pengusulan dari masyarakat itu sendiri. Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonom daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan tokoh masyarakat dalam proses pemekaran Kelurahan Takimpo, antara lain: (a) Keinginan masyarakat untuk memimpin pemerintahannya sendiri, yang diprakarsai oleh masyarakat yang bergabung dalam organisasi LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa). Sekarang disebut LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) beserta dengan masing-masing 10 kepala lingkungan Kelurahan Kombeli Kecamatan Pasarwajo, mengadakan suatu musyawarah untuk membahas bahwa Kelurahan Kombeli layak untuk melakukan satu pemekaran wilayah, namun dalam kegiatan musyawarah tersebut tidak terlepas dari bimbingan dan pengawasan pemerintahan Kecamatan Pasarwajo. (b) Kemudian dari hasil musyawarah memutuskan bahwa harus ada yang mengusulkan terkait adanya pemekaran Kelurahan Takimpo, dalam proses pengusulan tersebut waktu yang dibutuhkan untuk memperjuangkan terbentuknya Kelurahan Takimpo 1 tahun 2 bulan yakni diawali dari tahun 1980 sampai tahun 1981. (c) Selanjutnya sesudah pengusulan dilaksanakan dan disetujui kemudian diadakan kembali musyawarah, untuk membahas pembagian batas-batas wilayah Kelurahan Kombeli dan Kelurahan Takimpo (La Ramlia, Wawancara 25 September 2018).

Perkembangan Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton (1981-2017)

Pada saat tujuan tercapai berarti telah terjadi kondisi keseimbangan dalam diri seseorang baik dalam pemenuhan kebutuhan fisiologis maupun psikologis. Melihat penjelasan diatas, setelah sekian lamanya masyarakat mendiami Kelurahan Takimpo maka nampak perkembangan kehidupan mereka terutama dalam bidang:

1. Dalam Bidang Ekonomi.

Masyarakat Kelurahan Takimpo mengalami kemajuan demikian pula dengan profesi-profesi lain makin hari makin nampak, misalnya, petani, pedagang dan pekerjaan lain yang dapat memberikan hasil yang lebih baik untuk menghidupi keluarganya. Kenyataan ini timbul karena adanya dukungan dari kondisi alam di daerah Kelurahan Takimpo (La Saiji, Wawancara 7 November 2018).

2. Dalam Bidang Politik

Pemerintah merupakan sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Pemimpin pemerintah kelurahan adalah lurah yang dibantu perangkat lurah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah kelurahan. Untuk lebih jelasnya perkembangan Kelurahan Takimpo dapat dilihat dari periode-periode lurah yang pernah menjabat hingga saat ini sebagai berikut

Tabel
Periode Kepala-Kepala Kelurahan yang Pernah Menjabat Hingga Saat Ini

No.	Periode	Nama-Nama Lurah
1	1981-1993	La Kabona
2	1993-1994	Drs. La Ode Armus
3	1994-1996	La Nusa
4	1996-2003	Syahrudin
5	2003-2005	La Kabona
6	2005-2010	Dari Yatmana
7	2010-2011	La Aliju
8	2011-2012	La Udi
9	2012-2014	Tri Wahyudi
10	2014-2018	Ismail
11	2018-sekarang	La Dila

Sumber Kantor Kelurahan Takimpo Tahun 2017

Dari tabel 4 diatas maka jelas bahwa sejak awal terbentuknya hingga saat ini Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton telah dipimpin oleh beberapa orang lurah, yaitu pada tahun 1981-1993 dipimpin oleh La Kabona, pada tahun 1993-1994 dipimpin oleh Drs.La Ode Armus. Pada tahun 1994-1996 dipimpin oleh La Nusa, pada tahun 1996-2003 dipimpin oleh Syahrudin, pada tahun 2003-2005 dipimpin oleh La Kabona, pada tahun 2005-2010 dipimpin oleh Dari Yatmana, pada tahun 2010-2011 dipimpin oleh La Aliju, pada tahun 2011-2012 dipimpin oleh La Udi, pada tahun 2012-2014 dipimpin oleh Tri Wahyudi, pada tahun 2014-2018 dipimpin oleh Ismail, pada tahun 2018-sekarang dipimpin oleh La Dila.

Dalam perkembangan politik Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasarwajo Kabupaen Buton diawali dengan penunjukkan lurah pertama yaitu La Kabona, maka dimulailah pelaksanaan pemerintahan yang mempunyai hak otonomi begitu seterusnya hingga lurah saat ini yaitu La Dila (La Hari, Wawancara 10 Oktober 2018).

3. Dalam Bidang Sarana da Prasarana

Untuk menunjang taraf hidup masyarakat Kelurahan Takimpo, pemerintah menyadari harus membangun sejumlah infrastruktur seperti jalan tol yang menghubungkan akses jalan ke Kota Baubau. Hal ini untuk memudahkan arus transportasi, sehingga memudahkan masyarakat setempat untuk melakukan transaksi jual beli.

Dalam bidang pelayanan masyarakat, dalam hal ini struktur pemerintahan sudah cukup bagus. Pemerintah juga membangun sarana pemerintahan sebagai pusat pelayanan, baik dibidang pengurusan administrasi kependudukan, maupun sosialisasi penyuluhan pertanian. Hal ini akan lebih mempermudah mengedukasi masyarakat dalam hal kegiatan pertanian. Pemerintah juga membangun fasilitas kesehatan berupa puskesmas untuk memudahkan pelayanan kesehatan masyarakat. Sehingga soal pengobatan dasar masyarakat tidak lagi harus menuju rumah sakit kekota yang aksesnya cukup jauh dari Kelurahan Takimpo. Melalui adanya puskesmas membuat masyarakat tidak lagi menggantungkan diri kepada dukun setempat yang selama ini dipercaya dalam hal penyembuhan kesehatan. Selain itu pemerintah juga membangun tempat pendidikan yaitu SDN 1 Takimpo dan SDN 2 Takimpo agar anak-anak di kelurahan tersebut bisa bersekolah dan belajar. Kelurahan Takimpo juga memiliki benteng yang dinamkan Benteng Lipu Ogena, benteng ini dijaga dan dirawat oleh masyarakat setempat (La Saiji, Wawancara 20 Oktober 2018).

Setelah melihat pembangunan Kelurahan Takimpo, ditambah dengan faktor penduduk, sumber daya manusia dan sumber daya alam serta luas wilayah sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Berdasarkan penjelasan diatas terbukti bahwa adanya perkembangan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat Kelurahan Takimpo.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2002. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdulgani, Ruslan. 1967. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bandung: Prapantja.
- Arif, Muhamad. 2011. *Pengantar Kajian Sejarah*. Bandung: Yrama Widya.
- Anonim. 1999. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pengantar Desa dan Kelurahan*. Bandung: Cipta Umbaran.
- Dekdikbud. 1986. *Komunikasi Antara Daerah Suku Bangsa dan Pembaharuan*. Jakarta. Dirjen Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Gie, The Liang. 1994. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Harsono. 1984. *Pengantar Antropologi*. Bandung: Bina Cipta.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kelurahan>. diakses pada tanggal 28 April 2018.
- Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wicana.
- _____. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Madjid, M Dien 2014. *Sejarah Sebuah Pengantar*. Bandung: Prapantja.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Rifai, Ahmad. 2015. *Sejarah Kelurahan Labuan Wolio Kecamatan Wakarombu Utara Kabupaten Buton Utara (1997-2014)*. Skripsi Kendari: FKIP UHO
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metode Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- _____. 2012. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak
- Sarundajang. 1997. *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*. Jakarta: Pusataka Sinar Harapan.
- Sudirjo, Daeng. 1980. *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Aksara
- Sugianto. 2011. *Pengertian Sejarah, Konsep dan Ciri*. Diakses pada tanggal 25 April 2018 dari <http://serbasejarah.blogspot.com/2011/3/mengenal-sejarah.html>.
- Soejito, Irawan. 1986. *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*. Jakarta: Rajawali
- Soewito, MD. 2007. *Desa dan Kelurahan*. Bandung: Nuansa Aulia Sumber.
- Timu, Lisnawati. 2015. *Sejarah Desa Lembo Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna (1984-2015)*. Skripsi Kendari: FKIP UHO
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa atau Marga (Berdasarkan Undang-Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah)*. Jakarta: Raja Grafindo. Persada.